

Benang Kusut Pemberantasan Pungli di Indonesia

BANJARMASIN Post (15/6/2021) lewat Tajuknya telah merilis berita bahwa premanisme, pungutan liar (pungli), maupun calo marak kembali di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kasus ini terungkap karena adanya curahan hati salah satu supir truk kepada Presiden Joko Widodo. Para supir truk mengeluh ke presiden karena maraknya aksi premanisme dan pungli di kawasan Tanjung Priok.

Dari berita di atas, yang menarik perhatian saya adalah tentang berulang kembalinya praktik pungli di negeri ini. Hal ini mengisyaratkan praktik pungli belum berakhir, tidak ada efek jera meskipun sanksi hukum telah diberi kepada oknum pungli yang terbukti bersalah.

Seperti diketahui, sudah menjadi rahasia umum bahwa di hampir sebagian besar layanan publik ditemukan praktik pungli. Tak Cuma di pelabuhan, tapi juga di terminal umum dan bandara. Bahkan di sekolah tertentu atau di kantor pemerintahan sekalipun dalam urusan pelayanan publik. Masyarakat (terpaksa) rela bayar pungli demi kelancaran karena tidak ada pilihan lain, meski bertentangan dengan hati nurani (BPost, ibid).

Menjamurnya kembali praktik pungli ini tentu menjadi masalah sosial yang serius. Kita semua merasa prihatin. Prihatin karena kehidupan sosial menjadi tidak aman, meresakan mengelisahkan. Saya tidak habis pikir, di tengah kuatnya animo suatu lembaga untuk mengejar WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), bahkan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani), kenapa praktik pungli marak kembali. Di mana akar masalahnya? Apakah selama ini pemerintah abai terhadap kasak kusuk praktik pungli baik di institusi pemerintahan maupun dalam masyarakat luas?

Upaya Memberantas

Saya yakin, pemerintah tidak pernah abai dengan praktik pungli. Hanya saja gerakannya terkesan kalem. Sepak terjang Tim Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) tidak segencar seperti dulu, sepi. Berbagai slogan seperti kami tolak pungli, stop pungli, dan daerah bebas pungli yang dipajang di tempat-tempat layanan publik hanya sekadar dibaca. CCTV yang dipasang di kantor, di tempat-tempat strategis, seolah kehilangan fungsi. Akibatnya, sampai sekarang praktik pungli masih ada.

Seharusnya, baik slogan maupun CCTV, banyak membantu untuk menyadarkan oknum pungli agar meng-

hentikan praktik pungli. Namun kenyataannya, pesan-pesan moral dari slogan-slogan itu hanya sekadar diketahui belaka, padahal diharapkan dapat mencerahkan dan membangun jiwa. CCTV yang diharapkan lebih banyak dapat merekam praktik pungli, nyatanya tidak punya taji ketika praktik pungli dilakukan di luar kantor.

Kasus maraknya praktik pungli di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin adalah bukti nyata lemahnya pemberantasan praktik pungli di negeri ini. Ada kesan pura-pura tidak tahu padahal tahu. Ketika sudah ada yang mengadu, baru kemudian bergerak serempak. Seharusnya tidak seperti ini cara memberantas praktik pungli. Melakukan pemberantasan praktik pungli secara konsisten dan bertanggung jawab itu lebih diharapkan daripada hanya menunggu keluhan demi keluhan dan pengaduan bertumpuk-tumpuk.

Tiada kata henti untuk pemberantasan praktik pungli di negeri ini meskipun besar tantangan dan bahaya yang harus dihadapi. Tim Satgas Saber Pungli jangan loyo atau tebang pilih dalam memberangus praktik pungli. Jangan takut. Jangan gentar. Lakukan yang terbaik untuk negeri ini. Torehkan prestasi gemilang seperti yang pernah ditorehkan pada tahun 2017, di mana sukses mengobrok-abrik masalah pungli di bidang pertanahan dan pendidikan (BPost, ibid).

Maraknya kembali praktik pungli tahun 2021 ini seharusnya menjadi agenda besar bagi Tim Satgas Saber Pungli untuk bergerak cepat memberantasnya. Bila tidak, saya khawatir, praktik pungli akan bertambah-tambah di negeri ini. Selama ini memang diakui, pemberantasan praktik pungli sudah memperlihatkan hasilnya. Hanya saja dari sedikit oknum pungli yang berhasil tertangkap tangan, diringkus dan dijadili, masih banyak oknum pungli yang berkeliaran, mereka terus melakukan praktik pungli.

Kasus maraknya kembali fenomena praktik pungli di pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tri Sakti ini tentu bukan tanpa sebab. Secara psikologis, karena ada pertemuan antara keinginan (niat) dan kesempatan. Praktik pungli tidak akan terjadi jika tidak ada keinginan meskipun kesempatan selalu ada.

Bagai Benang Kusut

Dari berbagai fenomena di atas, sebenarnya pungli bukanlah masalah yang sederhana. Pungli bagaikan

benang kusut yang sulit diceraiberaikan. Secara teoretis, praktik pungli bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh dua faktor sebagai pendorongnya, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti soal lemahnya sistem pemerintahan yang memberi peluang praktik pungli, lemahnya pengawasan dan tidak konsistensinya penerapan hukum, tidak adanya akuntabilitas, dan kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antipungli.

Faktor internal menyangkut sikap mental dan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ingin (berniat) meraup uang sebanyak-banyaknya sikap mental jadi rusak. Demikian juga, karena pernah diminta uang ketika masuk pegawai, maka sikap mental jadi rusak. Memunglipun dilakukan untuk mengembalikan modal.

Dari kedua faktor di atas, yang paling berbahaya adalah faktor internal, yaitu sikap mental dan hawa nafsu. Ketika sikap mental dan hawa nafsu sudah rusak karena uang, maka faktor eksternal akan mudah "direkayasa" demi kepentingan praktik pungli. Oknum pungli pasti mencari-cari celah kesempatan yang aman untuk melakukan praktik pungli.

Lalu, apa yang menjadi akar masalah praktik pungli di Indonesia? Akar masalah dari praktik pungli yang selama ini terjadi di negeri ini justru merupakan perpaduan dari dua faktor eksternal dan internal tersebut. Itulah sebabnya, pemberantasan praktik pungli menjadi rumit bagaikan benang kusut.

Ketika sikap mental pungli telah menjerat jiwa dan karena memperurutkan hawa nafsu demi uang, ditambah dengan lemahnya sistem pemerintah dan pengawasan, tidak konsistensinya penerapan hukum, tidak adanya akuntabilitas, maka hal ini menjadi lahan subur bagi praktik pungli. Tidak hanya satu dua kali, tetapi terus menerus, berulang-ulang melakukan praktik pungli jika ada keinginan dan kesempatan. Kasus pungli di Tanjung Priok dan di Tri Sakti tak lain hanyalah pengulangan dari praktik pungli yang pernah terjadi masa lalu.

Akhirnya, pemberantasan pungli di negeri ini masih panjang dan berliku karena menyangkut sikap mental, nafsu dan uang. Ketika sikap mental dan nafsu diperbudak oleh uang, maka pungli ibarat benang kusut yang sulit diceraiberaikan. Sulit dibasmi jika jasa calo pungli masih dibutuhkan. Wassalam. (*)



OLEH:

DR. SYAIFUL BAHRI DJAMARAH, M.A.G.
(Pemerhati Masalah Sosial dan Pendidikan,
Wakil Dekan III FTK UIN Antasari
Banjarmasin)

Tiada kata henti untuk pemberantas praktik pungli di negeri ini meskipun besar tantangan dan bahaya yang harus dihadapi. Tim Satgas Saber Pungli jangan loyo atau tebang pilih dalam memberangus praktik pungli. Jangan takut. Jangan gentar. Lakukan yang terbaik untuk negeri ini. Torehkan prestasi gemilang seperti yang pernah ditorehkan pada tahun 2017, di mana sukses mengobrok-abrik masalah pungli di bidang pertanahan dan pendidikan